

# **SKRIPSI**

## **PENDEKATAN MODEL DELONE DAN MCLEAN DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE**

**HARDIANTO**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# **SKRIPSI**

## **PENDEKATAN MODEL DELONE DAN MCLEAN DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**HARDIANTO  
A031171013**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## PENDEKATAN MODEL DELONE DAN MCLEAN DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh

**HARDIANTO**  
**A031171013**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Agustus 2021

Pembimbing I

Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA  
NIP 19650219 199403 1 002

Pembimbing II

Hj. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si., CA  
NIP 19761105 200701 2 001



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP  
NIP 196604051992032003

# SKRIPSI

## PENDEKATAN MODEL DELONE DAN MCLEAN DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh

**HARDIANTO**  
**A031171013**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **9 September 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA	Ketua	
2	Hj. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2... 
3	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3... 
4	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4... 



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP  
NIP 196604051992032003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Hardianto  
NIM : A031171013  
departemen/program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **PENDEKATAN MODEL DELONE DAN MCLEAN DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 8 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Hardianto

## PRAKATA

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak sekali bimbingan, arahan, bantuan, dan juga dukungan. Skripsi ini merupakan tugas akhir peneliti dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan Bapak Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA selaku pembimbing pertama dan Ibu Hj. Rahmawati H.S, S.E, Ak., M.Si, CA selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas waktu, tenaga, saran dan motivasi yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Kantor Camat Mare yang telah memberikan izin dan bantuan kepada peneliti dalam melakukan penelitian ini. Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta keluarga dan teman-teman peneliti yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian skripsi ini.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 8 September 2021

Peneliti

## ABSTRAK

### PENDEKATAN MODEL DELONE DAN MCLEAN DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MARE, KABUPATEN BONE

#### *THE DELONE AND MCLEAN MODEL APPROACH IN DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM IN MARE DISTRICT, BONE REGENCY*

Hardianto  
Muhammad Ashari  
Rahmawati H.S

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Efektivitas penggunaan Sistem Keuangan Desa dengan menggunakan pendekatan Model DeLone dan McLean. Penelitian ini menggunakan data primer melalui metode survei dengan membagikan kuesioner kepada 51 Responden yang berada dalam lingkup Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Kuesioner yang kembali sebanyak 41 Responden yang diolah dengan menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh Variabel Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan terhadap Penggunaan SISKEUDES begitupun Penggunaan SISKEUDES berpengaruh terhadap manfaat Bersih yang dirasakan. Kemudian, untuk hasil pengujian secara simultan, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan SISKEUDES dan Penggunaan SISKEUDES berpengaruh signifikan terhadap Manfaat Bersih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SISKEUDES memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan efektivitas dan kinerja di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

**Kata kunci:** Model DeLone dan McLean, Efektivitas, Sistem Keuangan Desa.

*This study aims to test and analyze the effectiveness of using the Village Financial System using the DeLone and McLean Model approach. This study uses primary data through a survey method by distributing questionnaires to 51 respondents who are within the scope of Mare District, Bone Regency. The returned questionnaire was 41 respondents who were analyzed using linear regression analysis. The results of this study indicate that the influence of System Quality Variables, Information Quality, Service Quality on the Use of SISKEUDES as well as the use of SISKEUDES affects the perceived Net benefits. Then, for the simultaneous test results, System Quality, Information Quality, Service Quality have a significant effect on the use of SISKEUDES and the use of SISKEUDES has a significant effect on Net Benefits. Thus, it can be concluded that SISKEUDES has a significant role to improve effectiveness and performance in Villages in Mare District, Bone Regency.*

**Keywords:** Delone and McLean Model, Effectiveness, Village Financial System.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKAN</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	10
2.1.1 Model DeLone dan McLean .....	10
2.1.2 Definisi Sistem.....	12
2.1.3 Keuangan Desa.....	13
2.1.4 Aplikasi Siskeudes.....	17
2.2 Tinjauan Empirik.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran .....	22
2.4 Hipotesis Penelitian .....	24
2.4.1 Hubungan Kualitas Sistem terhadap Penggunaan SISKEUDES .....	24
2.4.2 Hubungan Kualitas Informasi terhadap Penggunaan SISKEUDES .....	24
2.4.3 Hubungan Kualitas Layanan terhadap Penggunaan SISKEUDES.....	24
2.4.4 Hubungan Penggunaan SISKEUDES terhadap Manfaat Bersih .....	25



<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	26
3.2 Tempat dan waktu .....	26
3.3 Populasi dan Sampel .....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	27
3.6.1 Variabel Independen .....	28
3.6.2 Variabel Dependen .....	29
3.7 Instrumen Penelitian .....	30
3.8 Analisis Data .....	32
3.8.1 Uji Kualitas Data .....	32
3.8.1.1 Uji Validitas .....	32
3.8.1.2 Uji Reliabilitas .....	32
3.8.2 Uji Asumsi Klasik .....	33
3.8.2.1 Uji Validitas .....	33
3.8.2.2 Uji Multikolinearitas .....	33
3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	34
3.8.3 Pengujian Hipotesis .....	34
3.8.3.1 Analisis Regresi Linear .....	34
3.8.3.2 Uji Koefisien Determinasi .....	35
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>36</b>
4.1 Deskripsi Data .....	36
4.2 Statistik Deskriptif .....	38
4.3 Hasil Analisis Data .....	43
4.3.1 Uji Kualitas Data .....	44
4.3.1.1 Uji Validitas .....	44
4.3.1.2 Uji Reliabilitas .....	46
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	46
4.3.2.1 Uji Normalitas .....	47
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas .....	47
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	49
4.3.3 Pengujian Hipotesis .....	49
4.3.3.1 Analisis Regresi Linear .....	49
4.3.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	50
4.3.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	52
4.3.3.4 Uji Koefisien Determinasi .....	52
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	53
4.4.1 Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Penggunaan SISKEUDES .....	53
4.4.2 Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Penggunaan SISKEUDES .....	54
4.4.3 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Penggunaan SISKEUDES .....	55

4.4.4 Pengaruh Penggunaan SISKEUDES terhadap Manfaat Bersih .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	59
5.3 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
3.1	Prosedur Pengembangan Kuesioner .....	31
4.1	Ikhtisar Kategori Responden .....	37
4.2	Statistik Deskriptif X1 .....	38
4.3	Statistik Deskriptif X2 .....	39
4.4	Statistik Deskriptif X3 .....	40
4.5	Statistik Deskriptif Y1 .....	41
4.6	Statistik Deskriptif Y2 .....	42
4.7	Hasil Uji Validitas .....	44
4.8	Hasil Uji Reliabilitas .....	46
4.9	Hasil Uji Multikolinearitas Y1 .....	48
4.10	Hasil Uji Multikolinearitas Y2 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
2.1	Model DeLone and McLean .....	11
2.2	Fitur Aplikasi Siskeudes .....	20
2.3	Kerangka Pemikiran .....	23
2.4	Kerangka Konseptual .....	25

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1 Biodata Peneliti .....	64
2 Kuesioner Penelitian .....	65
3 Daftar Populasi .....	69
4 Hasil Uji Analisis Data .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang terhubung langsung dengan masyarakat. Desa sebagai level pemerintahan terendah dan memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam sistem pemerintahan. Demikian pula Desa memiliki batas-batas wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan Desa. Undang-Undang tentang Desa ini bertujuan agar Desa menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. Pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal & Ayat 3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan memiliki transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Berdasarkan hasil Penelitian Papareng (2019) mengenai Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 yang terjadi di 3 Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas di 3 Desa tepatnya di Desa Pamolokan, Desa Pandian, dan Desa Pangarangan sudah sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Desa dalam mengelola pendapatan Alokasi Dana Desa serta bisa memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan apa saja hasil-hasil yang telah tercapai selama tahun anggaran bersangkutan. Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri, maka harus melakukan pertanggungjawaban atas segala wewenang yang telah diberikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar pelaporan keuangan. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) merupakan pedoman proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Selain adanya SAP, diperlukan juga suatu sistem yang dapat memudahkan pencapaian tersebut yaitu adanya dukungan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi maka pekerjaan akan lebih efektif dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Ikiyarti dan Nila, 2019).

Menyikapi Dana Desa yang cukup besar, tentu dibutuhkan suatu sistem yang berfungsi dalam pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri telah melakukan MoU pada tanggal 6 November 2015

dengan BPKP dalam hal pengelolaan keuangan Desa. Dalam MoU ini menegaskan bahwa agar desa-desa di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi SISKEUDES ini sebagai aplikasi resmi dari pemerintah yang akan diterapkan secara bertahap. Sistem ini merupakan bentuk kontrol terhadap kebijakan yang berkaitan tentang Dana Desa dengan penuh tanggung jawab. Penerimaan Sistem Keuangan Desa merupakan hal yang harus diperhatikan pengadopsian sistem informasi tersebut. Untuk itu, dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan menggunakan SISKEUDES diperlukan adanya SDM yang berkompeten dalam menjalankan Aplikasi tersebut khususnya Sekertaris Desa dan Bendahara Desa (Eleuterius, 2019).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa yang dulunya dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa. Pengembangan aplikasi sistem ini merupakan antisipasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan kewenangan bagi Desa untuk mengelola tata pemerintahan juga keuangannya secara mandiri. Tujuan utama dikembangkan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien (Khasanatur, 2017). Aplikasi SISKEUDES saat ini telah menemukan bentuknya yang pasti dan secara bertahap akan diterapkan di seluruh Indonesia untuk membantu Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara efektif dan efisien. Pengembangan aplikasi sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ([www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp](http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp)). Menurut penelitian Gayatri (2018) dapat disimpulkan bahwa



penerapan aplikasi SISKEUDES untuk pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Badung efektif terhadap kualitas laporan keuangan Dana Desa.

Guna meningkatkan potensi sumber daya manusia melalui pengelolaan Alokasi Anggaran Desa (ADD+DD) pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melaksanakan Bimtek kepada seluruh Desa se Kabupaten Bone. 328 Desa telah mengikuti pelatihan Aplikasi SISKEUDES secara serempak di Makassar sejak tahun 2017 dan hal ini di implementasikan tahun 2018 dan tak lagi ada alasan Desa tidak menggunakan aplikasi tersebut karena mereka sudah mengetahui sistemnya. Sebelum SISKEUDES diluncurkan, Sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang memiliki format yang tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDesa dan laporan keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, *user friendly*, dan desktop aplikasi serta memiliki sistem pengendalian *intern* yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Bone adalah kabupaten yang terdiri dari dua puluh tujuh kecamatan salah satunya kecamatan Mare, di kecamatan Mare terdapat satu kelurahan dan tujuh belas desa, di mana semua desa yang ada di kecamatan Mare telah menggunakan SISKEUDES. Kecamatan Mare telah menggunakan aplikasi sistem kuangan desa sejak tahun 2018 di Kabupaten Bone. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendorong

mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good village governance*) sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan.

Kurang lebih tiga tahun desa-desa yang ada di Kecamatan Mare menggunakan Aplikasi sistem keuangan desa tersebut. Kecamatan Mare telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang disebut Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kecamatan mare merupakan kecamatan yang menggunakan Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, kualitas, pengawasan kinerja pemerintahan, serta mampu membentuk transparansi pengelolaan keuangan yang dapat mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Penerapan SISKEUDES merupakan bentuk penerapan sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, saya bertujuan melakukan penelitian mengenai keefektifan penggunaan dari aplikasi tersebut menggunakan pendekatan Model DeLone dan McLean. Model penelitian dengan menggunakan Delone and McLean menggunakan 5 variabel yang sesuai untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas dari sistem tersebut.

Keberhasilan dari suatu sistem dilihat dari bagaimana suatu sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Salah satu model pengukuran keberhasilan sistem informasi yang sering digunakan adalah *information system (IS) success measurement* yang dikenalkan oleh DeLone dan McLean (1992) dan

dikembangkan pada tahun 2003. Model IS *Success* menggunakan 6 Variabel yaitu Kualitas Sistem (*system quality*), Kualitas Informasi (*information quality*), Kualitas Layanan (*service quality*), penggunaan (*use*), kepuasan pengguna (*use satisfaction*) dan manfaat bersih (*net benefit*). DeLone dan McLean (2016) mengembangkan pengukuran kesuksesan sistem informasi untuk mengukur sejauh mana manfaat bersih (*net benefits*) yang diterima oleh pengguna.

Penelitian empiris terhadap Model DeLone dan McLean (1992) yang dilakukan oleh McGill et al. (2003) menemukan bahwa *perceived information quality* dan *perceived system quality* merupakan prediktor yang signifikan bagi *user satisfaction*. Sedangkan *user satisfaction* juga merupakan prediktor yang signifikan bagi *intended use* dan *perceived individual impact*.

Studi lain yang dilakukan Livari (2005) menunjukkan hasil bahwa *perceived system quality* dan *perceived information quality* merupakan prediktor yang signifikan bagi *user satisfaction*, namun tidak signifikan terhadap intensitas penggunaan sistem tersebut, dan *User satisfaction* juga merupakan prediktor yang signifikan bagi *individual impact*. Hal ini dapat menjadikan argumentasi *research gap* yang mendorong dilakukannya pengujian empiris terhadap Model DeLone dan McLean yang dikembangkan dari tahun 1992, model yang diperbaharui tahun 2003 dan tahun 2006 mengenai menguji keberhasilan sistem informasi.

Penelitian Pujo dkk. (2015) tentang Model DeLone and Mclean untuk Mengukur Kesuksesan *E-government* Kota Pekalongan dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *E-government* efektif digunakan pada pemerintahan Kota Pekalongan. Penelitian berikutnya Agustian (2017) mengukur keberhasilan dari Sistem Informasi menggunakan pendekatan model DeLone dan McLean dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen

Daerah (SIMDA) Keuangan bahwa Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap manfaat bersih. Sedangkan, Kualitas Layanan dan penggunaan tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih.

Penelitian oleh Sigit dkk. (2019) mengenai menilai keberhasilan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dengan Validasi Model Keberhasilan Sistem Informasi Delone dan Mclean dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Penggunaan, Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Sistem, Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Sistem, Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Informasi, Penggunaan terhadap Kepuasan Sistem, Penggunaan terhadap Kepuasan Informasi, Kepuasan Sistem terhadap Dampak Individual, Kepuasan Informasi terhadap intensi konflik, dan Dampak Individual terhadap Dampak Organisasi serta Tidak ada pengaruh kualitas informasi terhadap penggunaan, kualitas sistem terhadap kepuasan informasi, penggunaan terhadap dampak individual, dan penggunaan terhadap dampak organisasi.

Berdasarkan Sistem Keuangan Desa yang telah digunakan apakah sistem tersebut efektif digunakan di desa-desa yang ada di Kecamatan Mare. Oleh Karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui keefektifan penggunaan dari Sistem Keuangan Desa tersebut dengan judul **“Pendekatan Model DeLone Dan McLean Dalam Menentukan Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah Kualitas Sistem Berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kec. Mare?
2. Apakah Kualitas Informasi Berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kec. Mare?
3. Apakah Kualitas Layanan Berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kec. Mare?
4. Apakah Penggunaan SISKEUDES Berpengaruh terhadap Manfaat Bersih?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis.

1. Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Penggunaan SISKEUDES di Kec. Mare
2. Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Penggunaan SISKEUDES di Kec. Mare
3. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Penggunaan SISKEUDES di Kec. Mare
4. Pengaruh Penggunaan SISKEUDES terhadap Manfaat Bersih

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi penulis, masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal perkembangan ilmu mengenai Pendekatan Model Delone Dan McLean Dalam Menentukan Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Mare

Kabupaten Bone. Selain itu, penelitian inipun diharapkan mampu dapat dikembangkan peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam membantu peneliti, pembaca, dan masyarakat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa dengan mengetahui Keefektivan Penggunaan SISKEUDES.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini. Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut.

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian, bab tinjauan pustaka berisi landasan teori dan proses peninjauan pustaka terkait teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini. Lalu, bab metodologi penelitian berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, instrumen penelitian, dan metode analisis data apa saja yang digunakan. Kemudian, bab hasil penelitian atau pembahasan memuat tentang hasil penelitian dari Pendekatan Model Delone dan McLean Dalam Menentukan Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Lalu, bab terakhir yaitu bab penutup berisikan kesimpulan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan penelitian.

## BAB II

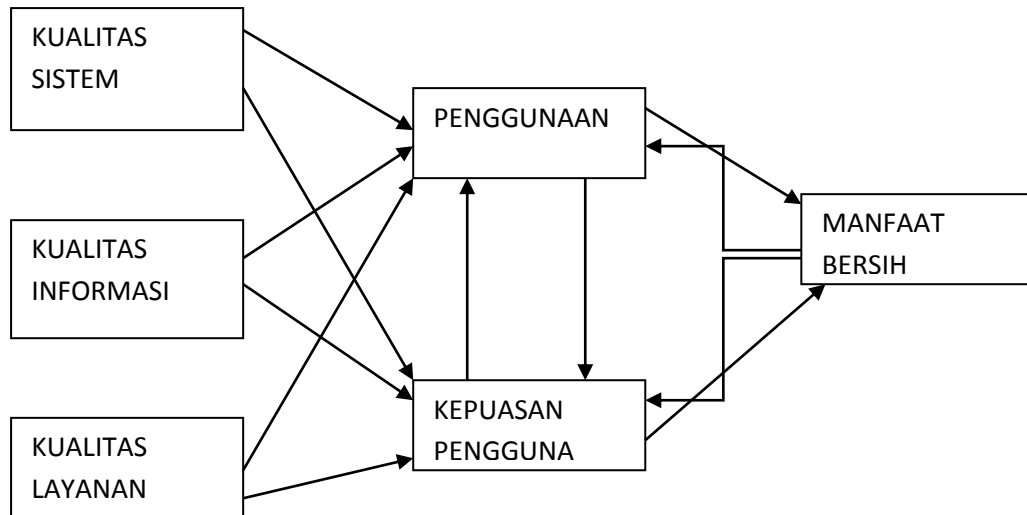
### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 Model DeLone dan McLean

Kesuksesan dalam membangun dan penerapan aplikasi sistem informasi diukur dengan tercapainya tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut secara efisien dan efektif. Kualitas sistem yang lebih tinggi diharapkan dapat menghasilkan kepuasan pengguna yang lebih tinggi dan penggunaannya akan membawa dampak positif pada produktivitas individu, sehingga berakibat pada peningkatan produktivitas untuk mencapai tujuan organisasi (DeLone dan McLean, 2003). Analisis keberhasilan sistem informasi perlu dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi, serta menemukan atau mengembangkan model sebagai kerangka pembuatan atau perbaikan sistem informasi. Kesuksesan Sistem Informasi adalah sebuah konstruksi multidimensi dan saling bergantung, oleh karena itu perlu dipelajari keterkaitan antar dimensi atau untuk mengendalikan dimensi tersebut (DeLone dan McLean, 2003).

Untuk melihat tingkat kesuksesan penerapan aplikasi SISKEUDES di desa-desa yang berada di Kecamatan Mare, diperlukan suatu metode untuk penilaian kesuksesan sistem informasi yaitu DeLone and McLean. Dimana metode ini mempresentasikan kesuksesan sistem informasi dalam enam buah variabel, yaitu: kualitas sistem, kualitas layanan, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan penggunaan dan manfaat bersih. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan keenam Variabel dari Model *DeLone dan McLean* (2016) untuk mengukur keberhasilan dari Sistem Keuangan Desa tersebut.



Sumber: DeLon and McLean 2016

**Gambar 2.1 Model DeLone and McLean**

Perubahan yang dilakukan oleh DeLone and McLean yaitu penambahan *Service Quality* (Kualitas Layanan) yaitu pelayanan yang diberikan oleh pengembang sistem informasi dan penambahan minat menggunakan sebagai alternatif dari penggunaan, serta penggabungan dampak individual dan dampak organisasi menjadi *net benefit* (manfaat bersih).

#### 1. Variabel Kualitas Sistem

Variabel Kualitas sistem berfokus pada performa sistem secara menyeluruh, baik dari kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan hingga prosedur dari sistem informasi bagi kebutuhan pengguna. Dimana Indikatornya terdiri atas *Ease of use* (kemudahan penggunaan), *Reliability* (reliabilitas), *Response time* (Waktu Respon), *Flexibility* (Fleksibilitas) dan *Language* (Bahasa).

#### 2. Variabel Kualitas Informasi

Merupakan output dari penggunaan sistem informasi oleh pengguna, berfokus pada kualitas informasi yang dihasilkan sistem dan kegunaannya bagi pengguna. Indikator yang digunakan terdiri dari *completeness* (kelengkapan),



*relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (ketepatan waktu), dan format penyajian informasi.

### 3. Variabel Kualitas Layanan

Variabel kualitas layanan merupakan pelayanan yang didapatkan oleh pengguna dari pengelola sistem informasi. Dimana indikator dari variabel ini adalah *assurance* (jaminan), *empathy* (empati), *responsiveness* (responsif), *Interpersonal Quality* dan *IS Training*.

### 4. Variabel Penggunaan

Variabel Penggunaan adalah keputusan penggunaan sistem informasi oleh pengguna dalam menyelesaikan tugas pengguna. penggunaan informasi mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Dalam kaitannya dengan hal ini penting untuk membedakan apakah pemakaiannya termasuk keharusan yang tidak bisa dihindari atau sukarela. Variabel ini diukur dengan indikator yaitu *frequency of use*, *Nature of use*, *Extent of use*, *Purpose of use and Use Satisfaction*.

### 5. Variabel Manfaat Bersih

Variabel Manfaat Bersih merupakan dampak keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja baik secara individual maupun organisasi. Pilihan dampak apa yang harus diukur tergantung dari sistem yang di evaluasi dan tujuan penelitian. Indikatornya adalah *Ease of Job*, *Effectiveness*, *Speed of Accomplishing task*, *job performance*, and *usefullnes in work*.

## 2.1.2 Definisi Sistem

Rusdiana (2014: 32) sistem adalah hubungan unit satu dengan unit lainnya yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu

kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Zaman modern dimana teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi guna mempermudah dalam proses penyelenggaraan pemerintah (*e-government*). Dimana-mana menggunakan sistem informasi dalam memudahkan pekerjaan.

Sahya (2013:1) sistem merupakan sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*). Menurut Gelinas (2008:13) yang mengatakan bahwa Sistem Informasi merupakan sistem yang dibuat oleh manusia yang secara umum terdiri dari seperangkat komponen berbasis komputer dan manual yang terintegrasi, yang dibuat dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi kepada pengguna. Selanjutnya menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa sistem sebagai suatu totalitas yang terdiri dari sub-sistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu.

### **2.1.3 Keuangan Desa**

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh informasi posisi keuangan dan apa saja hasil-hasil yang tercapai selama tahun bersangkutan. Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri, maka harus melakukan

pertanggungjawaban atas segala wewenang yang telah diberikan. Oleh karena itu, diperlukannya standar pelaporan keuangan.

Hasoloan Manalu menyampaikan bahwa pemerintah pusat, dari tahun ke tahun terus mengucurkan Dana Desa dengan jumlah yang terus menerus meningkat. Pada Tahun 2020 jumlah Dana Desa yang akan diberikan ke desa dengan jumlah tidak kurang dari 72 triliun rupiah (<http://www.bpkp.go.id/sulbar/berita/read/23902/0/PENGAWALAN-AKUNTABILITAS-KEUANGAN-DESA.bpkp>). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran.

Boedijono dkk. (2019) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pemerintah Desa didefinisikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Tamtama, 2014).

Salah satu tujuan pengaturan Desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintah Desa yang Profesional, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab (Masiyah, 2016). Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang terhubung langsung dengan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan masyarakat.

Pemerintah Desa memiliki tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan

Permasyarakatan Desa, menetapkan Peraturan Desa dan mengajukan rencana desa, mengajukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDBes), serta membina kehidupan masyarakat desa, perekonomian desa, pengembangan pendapatan desa. Pembagian wewenang sebagai wujud kemandirian desa ditunjukkan dengan peran masing-masing perangkat Desa yang meliputi KaDes (Kepala Desa), Badan Permasyarakatan Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, dan beberapa Kepala Saksi (KASI) bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan KASI.

Thomas (2013) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Prasetyo dkk. (2016) menyatakan bahwa proses Alokasi Dana Desa terdiri dari beberapa tahapan perencanaan yang merupakan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang dilakukan oleh Sekretaris Desa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) membahas dan menyepakati RAPBDes tersebut.

Wikeupedia (2018) pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Pengalokasian tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterima Kabupaten/Kota.

Jogloabang (2020) Kementrian Keuangan menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa. Dana Desa merupakan

Dana APBN bagi Desa, dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) mengemukakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### **2.1.4 Aplikasi SISKEUDES**

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. *Launching* Aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun Sistem Keuangan Desa dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dan juga membantu aparat desa dalam mengerjakan laporan keuangan agar cepat dalam melakukan pengerjaan laporan keuangan desa (Basori dkk, 2016).

SISKEUDES merupakan sebuah aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) Pusat, dengan Tujuan dari diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Tujuannya agar pengelolaan keuangan Desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah melalui kementerian dalam negeri telah melakukan MoU pada tanggal 6 November 2015 dengan BPKP dalam hal pengelolaan keuangan Desa. Dalam MoU ini menegaskan bahwa agar desa-desa di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi SISKEUDES ini sebagai aplikasi resmi dari pemerintah yang akan diterapkan secara bertahap. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Dokumen Penatausahaan.
- 2) Bukti Penerimaan.
- 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 4) Surat Setoran Pajak (SSP).
- 5) Dan dokumen-dokumen lainnya.
- 6) Laporan-laporan. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana).
- 7) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini yaitu :

1. Sesuai Peraturan
2. Memudahkan Tata kelola Keuangan Desa
3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi
4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (*Built-in Internal Control*)

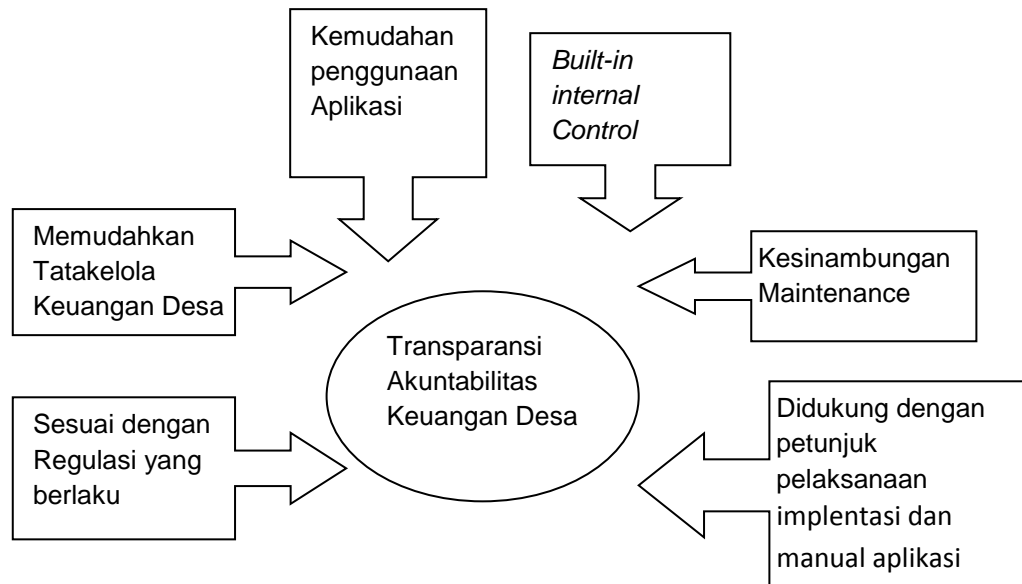
5. Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi.

Aplikasi SISKEUDES dirancang mampu memberikan manfaat dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di dalam aplikasi tersebut (User Friendly). Aplikasi SISKEUDES juga mempunyai tujuan agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari aplikasi ini adalah memudahkan para desa untuk membuat laporan RPJM Desa dan RKP Desa, APB Desa, Dokumen Penatausahaan, Laporan Realisasi APB Desa, Laporan kekayaan Milik Desa, Laporan realisasi per sumber dana, dan Laporan realisasi tingkat pemda. Di samping kelebihan tersebut, kelemahan dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diberikan bagi para pegawai.

Pada tanggal 27 November 2015 Kementrian dalam Negeri mengeluarkan Surat edaran Nomor : 143 / 8350 / BPD kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menegaskan agar Desa-Desa di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi SISKEUDES sebagai aplikasi resmi dari pemerintah. Selain surat edaran dari kemendagri, pada tanggal 31 Agustus 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengeluarkan surat edaran Nomor: B.7508/01-16/16/08/2016 kepada para Kepala Desa dimiliki seluruh Indonesia terkait pengelolaan keuangan Desa termasuk Dana Desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES tersebut dengan hal ini mempertegas bahwa aplikasi SISKEUDES tersebut menjadi aplikasi yang wajib harus dimiliki setiap Desa untuk mengelola keuangan Desa dan Dana Desa. Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan



akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan Desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan.



Sumber : [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

**Gambar 2.2 Fitur Aplikasi Siskeudes**

## 2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik merupakan suatu kajian yang diperoleh dari observasi atau penelitian. Beberapa orang telah melakukan penelitian terkait variabel pada penelitian ini, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai masukan dalam merancang dan melaksanakan penelitian ini.

Penelitian dari Lely dkk. (2018) dalam jurnal Penerapan Model Kesuksesan *Delone* dan *Mclean* pada Website Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) Universitas Brawijaya dimana hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa *website* FILKOM menunjukkan tingkat kesuksesan yang cukup atau sedang, sehingga *website* FILKOM masih memerlukan peningkatan untuk menghasilkan informasi dan memberikan layanan yang lebih baik lagi bagi penggunanya.

Penelitian dari Purwanto dan Suharno (2017) mengenai Pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan Kualitas layanan terhadap penggunaan sistem *E-learning* di program pascasarjana universitas Mercu buana. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik persepsi kualitas sistem akan semakin meningkatkan penggunaan sistem *E-Learning*, semakin baik persepsi kualitas informasi akan semakin meningkatkan penggunaan sistem *E-Learning*, dan semakin baik persepsi kualitas layanan akan semakin meningkatkan penggunaan sistem *E-Learning*.

Ni Nengah dan Yasa (2016) meneliti mengenai Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan persepsi pengguna adalah efektif dalam membantu pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya dari Reski (2018) meneliti tentang Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. Hasil penelitian tersebut berdasarkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Jennetallasa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di Desa Jennetallasa, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Jennetallasa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Sigit dkk. (2019) menilai keberhasilan sistem keuangan desa (SISKEUDES), Validasi model keberhasilan sistem informasi DeLone dan

McLean dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Penggunaan dan Kepuasan Sistem, terdapat Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Sistem dan Kepuasan Informasi, terdapat pengaruh Penggunaan terhadap Kepuasan Sistem dan Kepuasan Informasi, terdapat pengaruh Kepuasan Sistem terhadap Dampak Individual, terdapat pengaruh Kepuasan Informasi terhadap intensi konflik, terdapat pengaruh Dampak Individual terhadap Dampak Organisasi. Hal ini menunjukkan berdasarkan model sukses sistem informasi DeLone dan McLean (1992), Siskeudes menjadi sistem informasi yang berhasil.

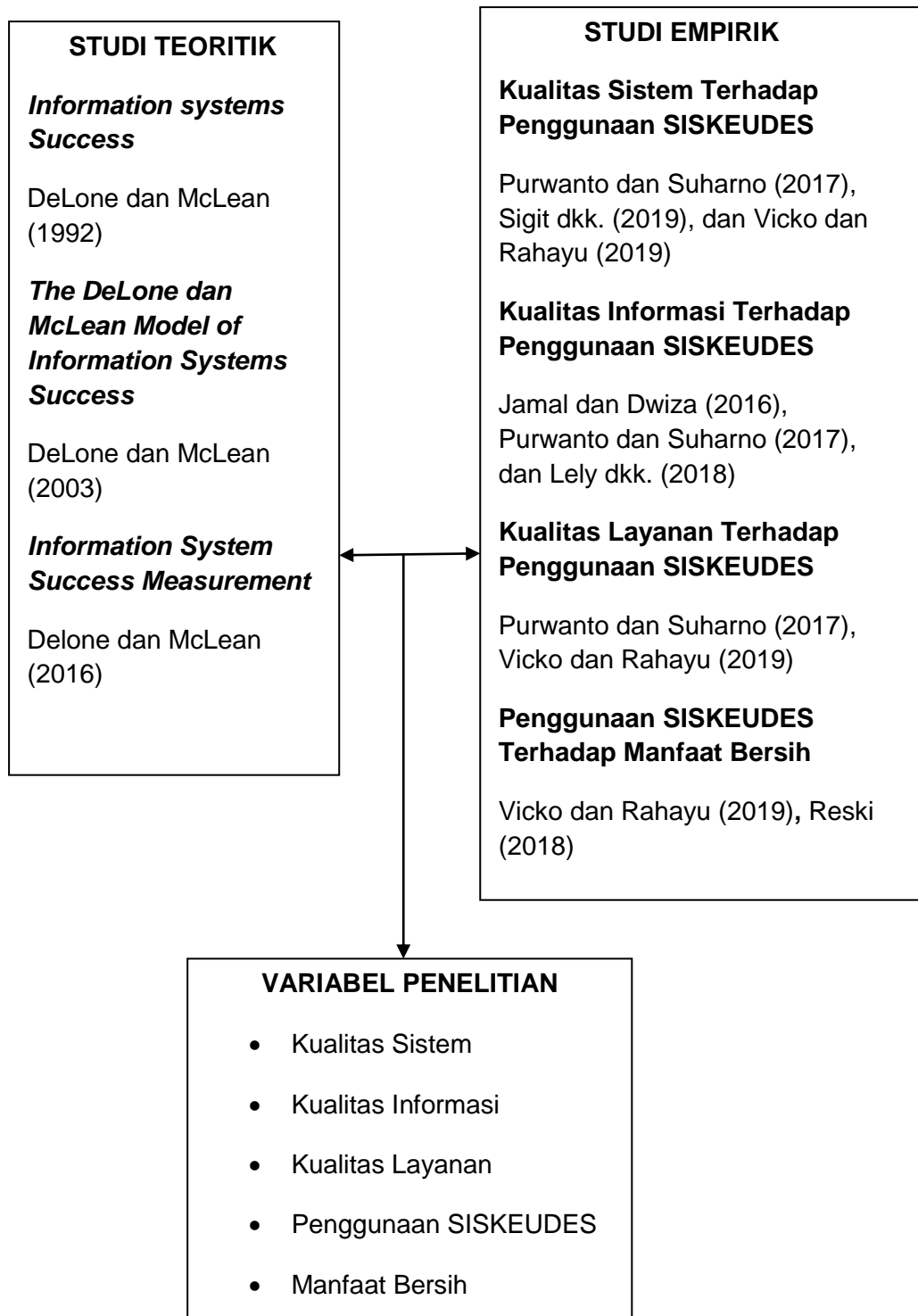
Penelitian dari Jamal dan Dwiza (2016) kajian keberhasilan penggunaan sistem informasi *Accurate* dengan menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLoen dan mclean. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem dari sistem informasi *Accurate* sudah baik sehingga pengguna merasa puas untuk memakai sistem ini. Dengan demikian, secara umum model kesuksesan DeLone & McLean merupakan kerangka yang dapat dijadikan untuk memberikan evaluasi atas implementasi penggunaan sistem informasi akuntansi yang *Accurate*.

Penelitian dari Vicko dan Rahayu mengenai kesuksesan penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dengan Model DeLone dan McLean. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Para pengguna aplikasi SISKEUDES merasa puas terhadap aplikasi yang di sediakan pemerintah dalam membantu membuat laporan keuangan.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, yang ingin diuji adalah mengenai Pendekatan Model DeLone dan McLean dalam menentukan efektivitas penggunaan Sistem

Keuangan Desa. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan penelitian sebagai berikut.



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Hubungan Kualitas Sistem terhadap Penggunaan SISKEUDES**

Kualitas Sistem merupakan salah satu Variabel dari Model Delone dan Mclean. Kualitas sistem yang baik akan meningkatkan penggunaan sistem yang akan memberikan manfaat kepada pengguna, misal keefektivan dan efisiensi suatu pekerjaan dengan menggunakan sistem. Menurut penelitian Purwanto dan Suharno (2017) yaitu semakin tinggi kualitas sistem *e-learning* yang disediakan oleh Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan sistem *e-learning* di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana.

H1: Kualitas Sistem berpengaruh Positif terhadap Penggunaan SISKEUDES

### **2.4.2 Hubungan Kualitas Informasi terhadap Penggunaan SISKEUDES**

Kualitas Informasi merupakan salah satu Variabel dari Model Delone dan Mclean. Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas informasi sistem itu sendiri, baik *software* maupun *hardware*. Kualitas sistem adalah performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna. Menurut penelitian dari Jamal dan Dwiza (2016) menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna.

H2: Kualitas Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan SISKEUDES

### **2.4.3 Hubungan Kualitas Layanan terhadap Penggunaan SISKEUDES**

Delone dan Mclean melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan menambah variabel Kualitas Layanan. Variabel kualitas layanan merupakan

pelayanan yang didapatkan oleh pengguna dari pengelola sistem informasi. Pelayanan Sistem Informasi dianggap penting, karena walaupun Sistem tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya pelatihan dan dukungan pengembangan maka pengguna akan kesulitan menggunakan atau mengoperasikan sistem tersebut. Hasil dari penelitian Jamal dan Dwiza (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan.

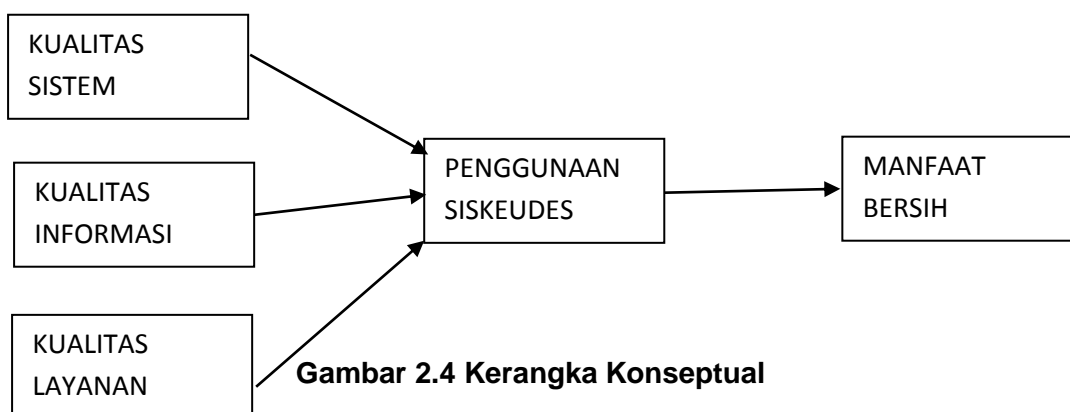
H3: Kualitas Layanan Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan SISKEUDES

#### 2.4.4 Hubungan Penggunaan SISKEUDES Terhadap Manfaat Bersih

Penggunaan merupakan salah satu Variabel dari Model Delone dan Mclean. Penelitian yang dilakukan oleh Lely dkk. (2018) menyebutkan bahwa Variabel penggunaan memiliki hubungan yang positif dengan variabel kepuasan pengguna dan variabel manfaat bersih. Dengan kata lain, setiap peningkatan atau perubahan yang terjadi pada variabel penggunaan juga akan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan manfaat bersih.

H4: Penggunaan SISKEUDES Berpengaruh Positif Terhadap Manfaat Bersih

Berdasarkan kerangka kerangka pemikiran dan hipotesis yang telah dirumuskan, maka kerangka konseptual yang dijadikan acuan penelitian ini. Berikut adalah gambar kerangka konseptual.



**Gambar 2.4 Kerangka Konseptual**